

PENERAPAN SIA, PARTISIPATIF ANGGARAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA OPD

Rully Vanyza Avany
Rullyvanyza0696@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to test and analyze the influence of information system accounting implementation, participative budgeting, functional supervision and community accountability to the local government performance (study on the regional devices organization (OPD) of Surabaya. The population that been used is at Surabaya Regional Devices Organization that consist of 17 OPD in the form of local agencies. This research used quantitative method. The data collection technique using questionnaire which are shared to each OPD represents by 4 employees (head of subsection, sub-section, staff and the head of leadership) so the total questionnaire has been shared as much as 68 and the returned questionnaire are 58. Data analysis technique that been used in this research is Multiple Linear Regression with using SPSS 23. This research results showed it has 3 variables that has a positive influence to the local government performance which is implementation of accounting system, functional supervision and public accountability and there is 1 variable that has not influenced the performance of the local government which is participative budgeting.

Keywords : Implementation of accounting information systems, participative budgeting, functional supervision, public accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada organisasi pemerintah daerah (OPD) Kota Surabaya. Populasi yang digunakan adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang terdiri dari 17 OPD berupa Dinas Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang di bagikan setiap OPD diwakili oleh 4 pegawai (kasubag, subbag, staff dan kepala pimpinan) sehingga total kuesioner yang dibagikan sebanyak 68 dan kuesioner yang kembali sebanyak 58. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan akuntabilitas publik serta ada 1 variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu partisipatif penyusunan anggaran.

Kata kunci: Penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, akuntabilitas publik

PENDAHULUAN

Suatu negara mempunyai pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan otonomi daerah bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Sehingga di dalam pemerintahan yang baik telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri yang tercantum pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Otonomi daerah telah menerapkan tata kelola *Good Governance*, Pemerintahan daerah yang baik, dalam mewujudkan akuntabilitas publik harus menerapkan sistem informasi akuntansi. Mengingat sangat pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintahan, maka apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai, mungkin instansi tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur. Sehingga penerapan sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh kinerja pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa serta mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan.

Dalam pengambilan keputusan harus melibatkan pegawai atau aparat pemerintah suatu organisasi publik untuk pencapaian tujuan serta sasaran yang telah diterapkan dalam partisipatif penyusunan anggaran, yang melalui perencanaan anggaran. Menurut mediaty, 2010 (dalam Rahayu *et al.*, 2014) partisipatif penyusunan anggaran merupakan pendekatan untuk meningkatkan kinerja yang mendorong efektifitas organisasi. Estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial (keuangan).

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) mempunyai peran dalam pengawasan, pengawasan dilakukan oleh aparat secara fungsional untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Supriyono (1990:150) menjelaskan pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Karena banyak organisasi yang tanpa sengaja tidak luput dari perbuatan kekhilafan atau kesalahan maka dari itu pengawasan dilakukan agar mencegah kesalahan dan mengoreksi suatu kesalahan yang terlanjut dilakukan (Supriyono, 1990:154). Maka dengan adanya pengawasan fungsional dapat menciptakan aparatur pemerintah yang baik, bersih dan berwibawah.

Organisasi sektor publik harus memenuhi akuntabilitas publik seperti halnya Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*); Akuntabilitas proses (*process accountability*); Akuntabilitas; Program (*program accountability*); Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002:20). Pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yakni DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak mendapatkan informasi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran. Sebab akuntabilitas publik sangat berperan penting terhadap pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat tuntutan masyarakat, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja agar dapat mencapai tujuan tertentu sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Partisipatif Penyusunan Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Dalam suatu penelitian akuntansi teori agensi merupakan teori yang sangat penting. Teori agensi muncul dimana individu-individu bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Teori agensi mengarah pada hubungan agensi pemilik (*principal*) yang memberi mandat pada pekerja (*agent*) serta menjelaskan tentang hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari kontrak. Teori agensi bertujuan untuk menyelesaikan masalah (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara *principal* dan

agen serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerja agen, (2) masalah pembagian resiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki perilaku yang berbeda terhadap resiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan preferensi resiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008:76).

Pada teori agensi yang menjelaskan tentang suatu hubungan agensi pemilik (*principal*) yang memberi mandat pada pekerja (*agent*) ini juga terdapat pada akuntabilitas publik yang menurut Mardiasmo (2002:20), bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kaewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Perangkat daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Dijelaskan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 pasal 1 perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur *staff* yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga *sekretariat*; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam *lembaga teknis* daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah (Renyowijoyo, 2013:119). PP Nomor 18 Tahun 2016 pasal 2, Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (3) Efisiensi; (4) Efektifitas; (5) Pembagian habis tugas; (6) Rentang kendali; (7) Fleksibilitas.

Jenis perangkat daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas (1) Sekretariat Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Inspektorat; (4) Dinas; (5) Badan; sedangkan Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas (1) Sekretariat Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Inspektorat; (4) Dinas; (5) Badan; (6) Kecamatan.

Kinerja

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kriteria keberhasilan kinerja seseorang atau organisasi mungkin tidak dapat diketahui ketika tidak ada tolak ukurnya yang berupa tujuan-tujuan atau target-target (Mahsun, 2006:25).

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2006:26).

Indikator Kinerja

BPKP, 2000 (dalam Mahsun, 2006:71) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2006:75) terdapat beberapa jenis indikator kinerja

pemerintah daerah yaitu (1) Indikator masukan (*input*); (2) Indikator proses (*proccess*); (3) Indikator keluaran (*output*); (4) Indikator hasil (*outcomes*); (5) Indikator manfaat (*benefit*); (6) Indikator dampak (*impact*).

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memerlukan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Informasi adalah fakta yang mempunyai arti untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem Akuntansi adalah seperangkat catatan, prosedur dan peralatan yang secara rutin berhubungan dengan peristiwa yang mempengaruhi prestasi dan posisi keuangan suatu organisasi. Jadi, Sistem Informasi Akuntansi suatu komponen organisasi yang dirancang untuk mengelolah data dan keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan, yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal (Winarno, 1994). Menurut Romney dan Steinbart (2014:12), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara (1) Dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen; (2) Dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan; (3) Dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan dimasa yang akan datang; (4) Dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu; (5) Dapat menganalisis data.

Partisipatif Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian, maka dari itu cara mendapatkan anggaran, mengalokasikan, serta mengawasi diperlukan proses serta sistem yang mengarah pada partisipatif anggaran dan tidak didasarkan oleh kepentingan individu agar tidak menyebabkan persoalan, maka dari itu informasi pada pemerintah daerah berupa informasi pada tiap-tiap dinas. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (keuangan) sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002:61).

Menurut Mardiasmo (2002: 68) ada beberapa tujuan mengenai penyusunan anggaran yaitu (1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; (2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan; (3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja; (4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD masyarakat luas.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional biasa disebut sebagai wasnal, wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supriyono, 1990:178). Sedangkan Pengawasan fungsional sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional terdiri dari Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya (Mashuqi, 2015).

Akuntabilitas Publik

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo, 2002:20) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*) dan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik; (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*) yakni terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi; (3) Akuntabilitas Program (*program accountability*) yakni terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yakni terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah DPRD/DPR dan masyarakat luas.

Perumusan Hipotesis

Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan mengkomunikasikan informasi *financial* dan *decision making* yang relevan kepada pihak luar (Baridwan, 1989:3). Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu *et al.*, (2014) bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan alasan dimana sistem yang digunakan berfungsi untuk membantu organisasi dalam hal mendokumentasikan mengadministrasikan serta mengolah data-data menjadi laporan. Oleh karena itu sesuai uraian diatas membuat hipotesis.

H₁ : Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Hubungan Partisipatif Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipatif penyusunan anggaran adalah mengukur seberapa jauh karyawan terlibat dalam penyusunan anggaran, pengaruh yang dirasakannya dan peran karyawan dalam proses penyusunan anggaran serta pencapaian target anggaran (Hapsari, 2010). Dengan adanya keterlibatan pegawai dapat secara langsung mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penetapan anggaran. Hal tersebut dikarenakan proses anggaran membuat anggaran lebih akurat dan pencapaian tujuan anggaran menghasilkan kinerja yang baik. Maka dari itu peneliti membuat hipotesisnya adalah Partisipatif Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂ : Partisipatif Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Hubungan Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional biasa disebut sebagai

wasnal, wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supriyono, 1990:178). Pada pasal 1 butir 4 PP No. 79 tahun 2005 mengamanatkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini hipotesisnya adalah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₃: Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta diinformasikan kepada masyarakat dan DPRD. Dalam demikian dapat dirumuskan hipotesisnya akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₄: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kasual komparatif (*casual comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena menitikberatkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 17 OPD. Penelitian ini mempunyai variabel bebas maupun variabel terikat, pada variabel bebas terdapat penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik. Sedangkan, pada variabel terikat terdapat kinerja pemerintah daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya, menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 pasal 5 bahwa jumlah OPD Kota Surabaya adalah 60 OPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, dan 31 Kecamatan Daerah Kota Surabaya. Dalam pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan "*purposive sampling*" yang merupakan salah satu teknik sampling *non-probability sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 126). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian. Kriteria pemilihan sampel responden yang diambil sebagai berikut (1) Berdasarkan pertimbangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran di lingkungan OPD Kota Surabaya; (2) Dinas/Badan yang terdaftar dalam www.surabaya.co.id atau yang berada pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 pasal 5; (3) Menduduki jabatan Kasubbag, subbag, staff atau kepala pimpinan dinas di OPD Kota Surabaya; (4) Bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kota Surabaya yang menduduki jabatan minimal 1 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yakni data primer. Data primer atau sumber data adalah data yang diberikan langsung oleh pemberi data atau responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada responden.

Dalam penelitian ini data primer dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner (Sugiyono, 2012:187). Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yakni pengumpul data atau peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden, Kuesioner di kirimkan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya agar dijawab kuesionernya sesuai petunjuk yang telah diberikan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja. Seperti atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 63).

Menurut Sugiyono (2012:64) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Penelitian ini mempunyai variabel bebas maupun variabel terikat, pada variabel bebas terdapat penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik. Sedangkan, pada variabel terikat terdapat kinerja pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah cara menemukan dan mengukur variabel-variabel dengan merumuskan secara singkat, serta tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran. Pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel, diukur dengan menggunakan *Skala Likert* seperti mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 136). Jenis pengukuran kuesioner dengan skala likert, suatu jawaban responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 point skala likert seperti dari skor terendah diberi point 1 sedangkan skor tertinggi diberi point 5. Dimana pada skor 1=sangat tidak setuju, skor 2=tidak setuju, skor 3=netral, skor 4=setuju, skor 5=sangat setuju. Variabel-variabel tersebut sebagai berikut (1) Variabel Independen (Variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terkait) (Sugiyono, 2009:59). Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik; (2) Variabel dependen (Variabel Terkait) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas) (sugiyono, 2009:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah.

Statistik deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:199) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid apabila suatu kuesioner terdapat yang mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan *degree of freedom* (df) = jumlah konstruk (n)-2. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai r bernilai positif, maka dapat disimpulkan indikator atau pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2016:52).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang telah dibuat, kuesioner merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk (n). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal yaitu jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu dan stabil terhadap pertanyaan (Ghozali, 2016:47). Dalam penelitian ini menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk (n) atau variabel dikatakan variabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 (Ghozali, 2016:48).

Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis penggunaan model regresi akan menghasilkan nilai parameter yang valid, jika model tersebut dapat memenuhi persyaratan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:156). Selain itu melihat grafik, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *non-parametrik kolmogrov-smirnov* (K-S). Berikut dasar pengambilan keputusan untuk uji *non-parametrik kolmogrov-smirnov* (K-S) yaitu (1) Jika *kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal; (2) Jika *kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual tidak normal (Ghozali, 2016: 158). Uji multikolinieritas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai (1) *Varianceinflation factor* (VIF), dapat dikatakan tidak terdeteksi atau tidak adanya multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi, apabila nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10; (2) *Tolerance*, dapat dikatakan tidak terdeteksi atau tidak adanya multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi, apabila nilai *tolerance* mendekati angka 1 (Ghozali, 2016:103). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di *studentized* (Ghozali, 2016: 134). Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah sebagai

berikut (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan menggunakan metode analisis linier berganda. Analisis regresi biasanya digunakan untuk meramalkan atau memperhatikan suatu nilai dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui garis persamaan regresinya, model regresi berganda ini bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui besarnya (Ghozali, 2016).

Model regresi linier berganda telah dirumuskan sebagai berikut :

$$KPD = \alpha + \beta_1PSIA + \beta_2PPA + \beta_3PF + \beta_4AP + \varepsilon$$

Keterangan :

K	: Kinerja Pemerintah Daerah
α	: Konstanta
β_{1-4}	: Koefisien Regresi
PSIA	: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
PPA	: Partisipatif Penyusunan Anggaran
PF	: Pengawasan Fungsional
AP	: Akuntabilitas Publik
ε	: Koefisien <i>Error</i>

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan dependen.

Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R² mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan. Sedangkan nilai R² yang memiliki nilai 1 atau mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F atau uji anova menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5% (Ghozali, 2016: 96).

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (Ghozali, 2016:96), yaitu sebagai berikut (1) Jika nilai signifikan uji F > 0,05 maka, model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji F < 0,05 maka, model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya.

Uji t (Uji statistik)

Uji statistik menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen dengan menanggapi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2016:97). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05

($\alpha = 5\%$). Pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (Ghozali, 2016:97) adalah sebagai berikut kriterianya (1) Jika angka probabilitas signifikansi uji $t > 0,05$ maka, hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara uji statistik t , variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika angka probabilitas signifikansi uji $t < 0,05$ maka, hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Berarti secara uji statistik t , variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSIA	58	3,00	5,00	3,7560	0,45258
PPA	58	3,00	4,80	3,9241	0,39794
PF	58	3,00	4,85	3,8666	0,40091
AP	58	3,00	5,00	4,1536	0,46804
KPD	58	3,08	5,00	3,9655	0,42305
Valid N (listwise)	58				

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 bahwa (1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,7560, nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang diambil sebagai sampel dikatakan baik serta mendapatkan nilai minimum yang didapat sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 0,45258, yakni menjauhi angka 0 yang berarti penyebaran data yang cukup beragam; (2) Partisipatif Penyusunan Anggaran mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,9241, nilai tersebut menunjukkan bahwa partisipatif penyusunan anggaran yang diambil sebagai sampel dikatakan baik serta mendapatkan nilai minimum yang didapat sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 4,80. Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 0,39794, yakni menjauhi angka 0 yang berarti penyebaran data yang cukup beragam; (3) Pengawasan Fungsional mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,8666, nilai tersebut menunjukkan bahwa pengawasan fungsional yang diambil sebagai sampel dikatakan baik serta mendapatkan nilai minimum yang didapat sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 4,85. Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 0,40091, yakni menjauhi angka 0 yang berarti penyebaran data yang cukup beragam; (4) Akuntabilitas Publik mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 4,1536, nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik yang diambil sebagai sampel dikatakan baik serta mendapatkan nilai minimum yang didapat sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 0,46804, yakni menjauhi angka 0 yang berarti penyebaran data yang cukup beragam; (5) Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,9655, nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diambil sebagai sampel dikatakan baik serta mendapatkan nilai minimum yang didapat sebesar 3,08 dan nilai maximum sebesar 5,00. Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 0,42305, yakni menjauhi angka 0 yang berarti penyebaran data yang cukup beragam.

Uji Validitas

Hasil uji validitas dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik dapat dikatakan valid, karena dengan *degree of freedom* (df) = N-2 jadi 58-2 = 56 dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,2586. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yakni $r_{hitung} > 0,2586$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas diketahui dari *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Bahwa hasil seluruh variabel memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Maka dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (Reliabel).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini mendeteksi apakah suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik normal *P-P Plot Regression Standardized residual*. Grafik yang didapat, bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), syarat pengambilan keputusan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hasil yang di dapat bahwa nilai signifikan sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual *Kolmogorov-smirnov*, sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Multikolinieritas.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel dependen serta telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas serta telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Partisipatif Penyusunan Anggaran, Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil analisis yang diperoleh dari SPSS 23 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-,288	,256	-1,122	,267
	PSIA	,137	,055	2,494	,016
	PPA	,171	,136	1,260	,213
	PF	,287	,140	2,056	,045
	AP	,471	,061	7,668	,000

a. Dependent Variable : KPD

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat diprediksi kinerja pemerintah daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{KPD} = -0,288 + 0,137\text{PSIA} + 0,171\text{PPA} + 0,287\text{PF} + 0,471\text{AP} + \varepsilon$$

Persamaan regresi dapat menunjukkan masing-masing variabel independen memiliki nilai koefisien regresi yang bertanda positif, berikut ini penjelasan tentang persamaan regresi diatas (1) Nilai konstanta (α) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui memiliki konstanta sebesar -0,288. Menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik = 0; (2) Koefisien regresi penerapan sistem informasi akuntansi (b_1) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_1 adalah 0,137 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kinerja pemerintah daerah; (3) Koefisien regresi partisipatif penyusunan anggaran (b_2) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_2 adalah 0,171 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara partisipatif penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah; (4) Koefisien regresi pengawasan fungsional (b_3) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_3 adalah 0,287 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara pengawasan fungsional dengan kinerja pemerintah daerah; (5) Koefisien regresi akuntabilitas publik (b_4) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_4 adalah 0,471 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara akuntabilitas publik dengan kinerja pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model summary ^b		
		R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,852	,840	,16903

a. Predictor: (constant), AP, PSIA, PPA, PF

b. Dependent variable: KPD

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi *R-Square* sebesar 0,852 atau 85,2%, maka ini menunjukkan bahwa variasi dependen (kinerja) dapat dijelaskan oleh 4 variabel independen (penerapan sistem informasi akuntansi, partisipatif penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik), artinya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen sebesar 85,2% sedangkan sisanya 14,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang telah digunakan dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait secara bersama-sama. Berikut hasil uji kelayakan model (Uji F) dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji kelayakan model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F _{hitung}	Sig.
1	Regression	8,687	4	2,172	76,016	,000 ^b
	Residual	1,514	53	,029		
	Total	10,201	57			

a. Dependent Variable : KPD

b. Predictors : (Constant), AP, PSIA, PPA, PF

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 76,016 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat digunakan karena tingkat signifikan F 0,000 < 0,05. Sehingga seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Uji t (Uji statistik)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji kelayakan model (Uji t) dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-,288	,256	-1,122	,267	
	PSIA	,137	,055	2,494	,016	
	PPA	,171	,136	1,260	,213	
	PF	,287	,140	2,056	,045	
	AP	,471	,061	7,668	,000	

a. Dependen variabel : KPD

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil uji t dengan perumusan hipotesis sebagai berikut (1) Penerapan sistem informasi akuntansi menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,494 dengan nilai signifikan 0,016 maka lebih kecil dari signifikan $\alpha=0,05$ menandakan bahwa hipotesis (H₁) dalam penelitian ini diterima dengan demikian penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; (2) Partisipatif penyusunan anggaran menunjukkan t_{hitung} sebesar 1,260 dengan nilai signifikan 0,213 maka lebih besar dari signifikan $\alpha=0,05$ menandakan bahwa hipotesis (H₂) dalam penelitian ini tolak dengan demikian partisipatif penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; (3) Pengawasan fungsional menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,056 dengan nilai signifikan 0,045 maka lebih kecil dari signifikan $\alpha=0,05$ menandakan bahwa hipotesis (H₃) dalam penelitian ini diterima dengan demikian Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; (4) Akuntabilitas publik menunjukkan t_{hitung} sebesar 7,668 dengan nilai signifikan 0,000 maka lebih kecil dari signifikan $\alpha=0,05$ menandakan bahwa hipotesis (H₄) dalam penelitian ini diterima dengan demikian akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 2,494 dengan nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_1 dapat diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi di dalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan jawaban responden melalui kuesioner dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi sangat baik karena dengan menerapkan sistem yang telah tersedia dapat mengakses sistem dengan cepat, sistem yang digunakan dapat menjamin seluru data, dapat mempercepat penyelesaian tugas. Sehingga pemerintah daerah telah menerapkan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan kinerja dengan mempermudah pekerjaan karyawan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Rahayu *et al.*, (2014), menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipatif Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat dilihat bahwa partisipatif penyusunan anggaran menunjukkan arah negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 1,260 dengan nilai signifikan $0,213 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa partisipatif penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_2 ditolak.

Hal ini disebabkan jawaban responden melalui kuesioner bahwa yang paling banyak terlibat dan mempunyai pengaruh yang sangat tinggi dalam proses penyusunan anggaran pada organisasi pemerintah daerah adalah yang mempunyai wewenang atau kedudukan setingkat kbid/kasubag keuangan/kasie, kalau hanya disetarakan dengan staff sangat berbeda jauh kinerjanya dikarenakan tidak semua staff berwenang menyusun anggaran

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Biduri (2011) yang menyatakan bahwa partisipatif penyusunan anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat dilihat bahwa pengawasan fungsional menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 2,056 dengan nilai signifikan $0,045 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_3 dapat diterima.

Hal ini disebabkan bahwa pengawasan fungsional telah mempersiapkan pemeriksaan dengan baik, dengan menggunakan undang-undang untuk dasar pemeriksaan, selalu membuat hasil kegiatan pemeriksaan, serta harus mengkoordinasi pengawasan internal maupun eksternal agar kinerja menjadi baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan fungsional biasa disebut sebagai wasnal, wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Supriyono, 1990:178). Teori tersebut sesuai dengan pasal 1 butir 4 PP No. 79 tahun 2005 mengamanatkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka membuktikan bahwa semakin tinggi pengawasan fungsional di dalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian Hervianda *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 5 dapat dilihat bahwa akuntabilitas publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 7,668 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_4 dapat diterima.

Hal ini disebabkan bahwa akuntabilitas publik telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, memprogram anggaran, melaksanakan program anggaran, mengalokasikan dana anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab terhadap peningkatan anggaran melalui kinerja kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik di dalam lingkup pemerintah daerah kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hervianda *et al.*, (2014) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta hasil penelitian Putra (2013), yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Padang. Maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat menarik kesimpulan bahwa (1) Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya sebesar 0,016 menunjukkan bahwa $0,016 < 0,05$; (2) Partisipatif penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya sebesar 0,213 menunjukkan bahwa $0,213 > 0,05$; (3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya sebesar 0,045 menunjukkan bahwa $0,045 < 0,05$; (4) Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya sebesar 0,000 menunjukkan $0,000 < 0,05$.

Saran

Saran merupakan suatu masukan agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya (1) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tidak hanya dengan kuesioner harus di dampingin dengan wawancara agar jawaban responden dapat terperinci; (2) Peneliti selanjutnya menambah ruang lingkup penelitian, seperti memperbanyak jumlah tidak hanya meneliti dinas namun perangkat daerah lainnya seperti inspektorat, kecamatan atau mengganti lingkup kota menjadi provinsi; (3) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kembali variabel yang sama dengan penelitian ini, namun dengan menambah atau mengurangi variabel independennya. Menyarankan menggunakan variabel penerapan standart akuntansi pemerintahan, komitmen organisasi atau bisa mengganti variabel dependennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsdianyah, A. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Baridwan, Z. 1989. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. UNDIP. Semarang.
- Hapsari, N. 2010. Pengaruh Paertisipatif Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan *Locus Off Control* Sebagai Variabel Moderating (studi kasus pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Devisi Kontruksi I). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harvianda, Y. P., R. A. S. Surya, dan N. Azlina. 2014. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. *JOM FEKOM1*(2).
- Ikhsan, A dan H.B. Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakkan Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mashuqi, A.A. 2015. Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional dan pengawasan politis. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>. 24 Oktober 2017 (19:43).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2016 *Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 79 tahun 2005 *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). <http://ejournal.unp.ac.id/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2017 (21:27).
- Rahayu, S., E. Sulindawati, dan K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Partisipatif Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja 2(1).
- Renyowujiyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi Ketiga. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

- Romney, M.B dan P. J Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketigabelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Biduri. S. 2011. Pengaruh Partisipatif Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 8 : 41-56.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kedua. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Supriyono, R.A. 1990. *Pemeriksaan Manajemen (Management Auditing) Dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Pemkot Surabaya. 2017. Organisasi Perangkat Daerah. <http://www.surabaya.go.id//>. 27 November 2017 (10:03).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 *Otonomi Daerah*.
- Winarno, W.W. 1994. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.